

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 15.833.0055**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019**

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area**

**OLEH:  
BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 15.833.0055**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

## LEMBAR PENGESAHAN

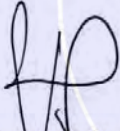
Judul Skripsi : Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Pada KPP Pratama Binjai

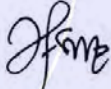
Nama : Bagas Syahputra

NPM : 15.833.0055

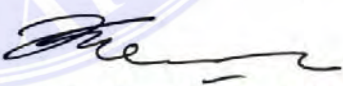
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dra. Retnawati Siregar, M.Si  
Pembimbing I

  
Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak  
Pembimbing II

  
  
Dr. Husein Effendi, SE, M.Si  
Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA  
Ka. Pogram Studi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 September 2019

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2019



**Bagas Syahputra**  
**NPM : 158330055**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 158330055  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 26 September 2019

Yang menyatakan



Bagas Syahputra

158330055



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan, pada tanggal 17 Mei 1997 dari Ayahanda Alm. Harianto dan Ibunda Muslyna Herlina Siregar. Peneliti merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Tahun 2015 peneliti lulus dari SMA Negeri 2 Medan, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 15.833.0055**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2019**

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area**

**OLEH:  
BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 15.833.0055**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**



## LEMBAR PENGESAHAN

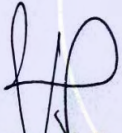
Judul Skripsi : Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Pada KPP Pratama Binjai


Nama : Bagas Syahputra

NPM : 15.833.0055

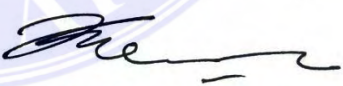
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Dra. Retnawati Siregar, M.Si  
Pembimbing I

  
Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak  
Pembimbing II

  
  
Dr. Hsain Effendi, SE, M.Si  
Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA  
Ka. Pogram Studi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 September 2019

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2019



*Bagas Syahputra*  
**Bagas Syahputra**  
**NPM : 158330055**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGAS SYAHPUTRA  
NPM : 158330055  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 26 September 2019

Yang menyatakan



Bagas Syahputra

158330055

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan, pada tanggal 17 Mei 1997 dari Ayahanda Alm. Harianto dan Ibunda Muslyna Herlina Siregar. Peneliti merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Tahun 2015 peneliti lulus dari SMA Negeri 2 Medan, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

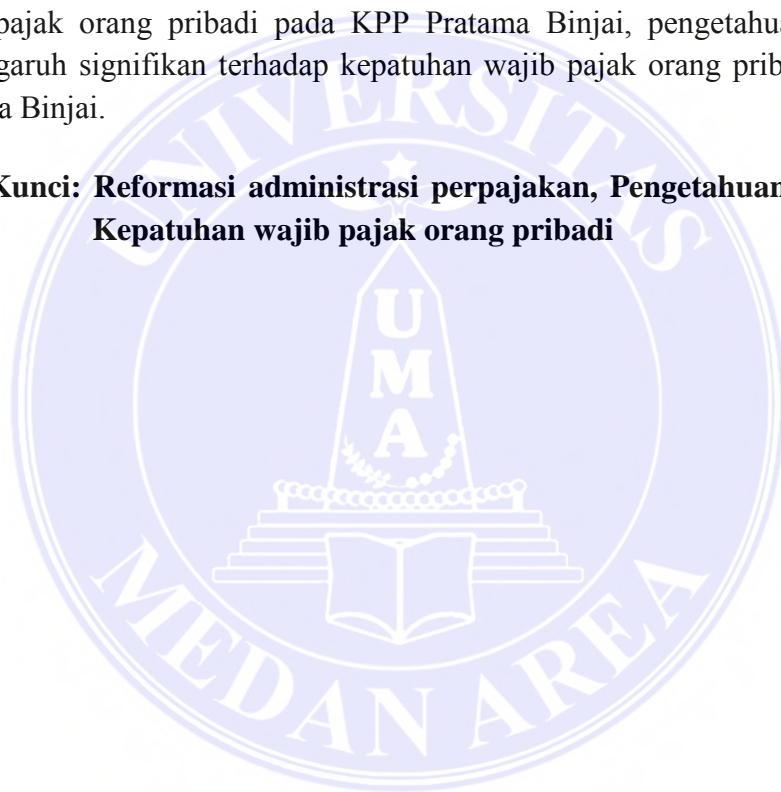




## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai baik secara parsial maupun simultan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi yg terdaftar di KPP Pratama Binjai dengan pengambilan sampel menggunakan metode *Accidental Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

**Kata Kunci: Reformasi administrasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi**





## **ABSTRACT**

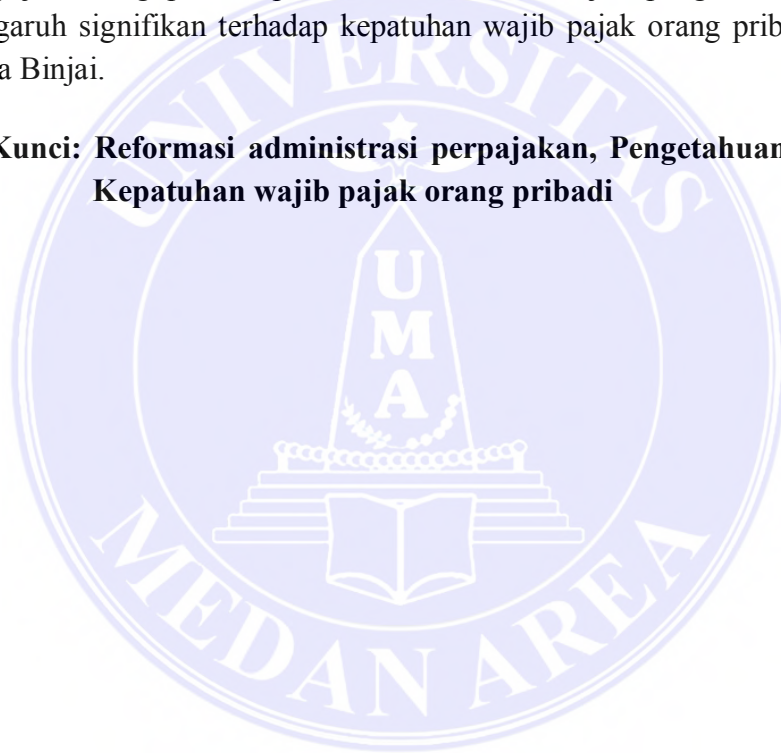
*This study aims to determine the effect of tax administration reform and tax knowledge on individual taxpayer compliance at Binjai Primary Tax Office both partially and simultaneously. The type of data in this study is quantitative data and primary data sources. The technique of data collection is done by questionnaire. The number of samples in this study were 50 individual taxpayers registered in Binjai Primary Tax Office by sampling using the Accidental Sampling method. Data analysis techniques used in this study are the validity and reliability test, the classic assumption test, and the multiple linear regression test. The results showed that tax administration reform significantly affected the compliance of individual taxpayers at Binjai Primary Tax Office, tax knowledge had a significant effect on the compliance of individual taxpayers at Binjai Primary Tax Office.*

**Keywords:** *Tax administration reforms, Tax knowledge, Personal taxpayer compliance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai baik secara parsial maupun simultan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi yg terdaftar di KPP Pratama Binjai dengan pengambilan sampel menggunakan metode *Accidental Sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

**Kata Kunci:** Reformasi administrasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi



## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax administration reform and tax knowledge on individual taxpayer compliance at Binjai Primary Tax Office both partially and simultaneously. The type of data in this study is quantitative data and primary data sources. The technique of data collection is done by questionnaire. The number of samples in this study were 50 individual taxpayers registered in Binjai Primary Tax Office by sampling using the Accidental Sampling method. Data analysis techniques used in this study are the validity and reliability test, the classic assumption test, and the multiple linear regression test. The results showed that tax administration reform significantly affected the compliance of individual taxpayers at Binjai Primary Tax Office, tax knowledge had a significant effect on the compliance of individual taxpayers at Binjai Primary Tax Office.*

**Keywords: Tax administration reforms, Tax knowledge, Personal taxpayer compliance**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Ridha-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai”**.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini salah satu sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti akan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di sisi lain, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang, Ayahanda Nazaruddin dan ibunda Muslyna Herlina Siregar. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini
2. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.

4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Hery Syahrial, SE, Msi.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, Msi, CA.
6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
9. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
10. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
11. Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak SUMUT I yang telah mengizinkan dan menerima peneliti untuk mengadakan penelitian ini.



12. Bapak Salom P. Panggabean selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Binjai yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
13. Seluruh Pegawai KPP Pratama Binjai yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
14. Kakak tersayang, Iqlyma Lestari Nasution, SE. dan Elvidayani Nasution, SH. Terima kasih banyak untuk setiap bantuan, dukungan yang sudah diberikan dan selalu menemani peneliti dalam setiap urusan penelitian.
15. Abang tersayang, Raja Putra Idaman. Terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian yang sudah diberikan. Terima kasih karena selalu mengangkat apabila ada kesalahan yang peneliti lakukan.
16. Sahabat-sahabat peneliti Hidir Muharram Lubis, Kevin Pratama, Farhan Farrazi, Iren Faurissa, Indah Safitri, yang telah bersedia mendengarkan keluh-kesah serta dukungan dan semangat yang diberikan. Dan teman-teman yang selalu menemani peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka.
17. Arini Yuris, Sahifah Nur Lubis, Ary Juanda, Mahadir Aviv Nasution, Azhami Maulana, Muhammad Habaeb beserta teman-teman angkatan 2015 lainnya yang selalu menemani peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka.
18. Teman-teman Akuntansi Grup A Stambuk 2015 yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.

19. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulisan skripsi ini peneliti harapkan dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak. Terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Medan, September 2019

Peneliti

**Bagas Svahputra**  
**NPM: 15.833.0055**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian. ....	5
1.4. Manfaat Penelitian. ....	6
<b>BAB II:TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Uraian Teori .....	7
2.2. Reformasi Administrasi Perpajakan.....	9
2.2.1 Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan .....	10
2.2.2 Indikator Reformasi Administrasi Perpajakan .....	11
2.3. Pengetahuan Perpajakan.....	11
2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	12
2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	12
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	14
2.5. Penelitian Terdahulu. ....	14
2.6. Kerangka Konseptual. ....	15
2.7. Hipotesis Penelitian.....	17

**BAB III:METODE PENELITIAN.....18**

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
3.2. Populasi dan Sampel .....	19
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	20
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6. Teknik Analisa Data.....	23

**BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 31**

4.1. Gambaran Umum Penelitian.....	31
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
4.2. Hasil Penelitian .....	33
4.2.1.Deskripsi Data Responden.....	33
4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	35
4.2.3.Analisis Data .....	40
4.2.3.1 Uji Kualitas Data .....	40
4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	47
4.2.3.4 Uji Hipotesis .....	48
4.3. Pembahasan.....	53
4.3.1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	53
4.3.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	54
4.3.3. Pengaruh Secara Simultan.....	55

**BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN ..... 56**

5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA ..... 59**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian .....	19
Tabel 4.1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	33
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	34
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	34
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi WP .....	35
Tabel 4.6. Tabulasi Reformasi Administrasi Perpajakan.....	36
Tabel 4.7. Tabulasi Pengetahuan Perpajakan .....	37
Tabel 4.8. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
Tabel 4.9. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X1 Reformasi Administrasi Perpajakan .....	40
Tabel 4.10. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X2 Pengetahuan Perpajakan .....	41
Tabel 4.11. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	42
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas masing-masing Variabel.....	43
Tabel 4.13. Uji Multikolinearitas .....	45
Tabel 4.14. Output Uji Regresi Linier Berganda.....	47
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Parsial .....	49
Tabel 4.16. Hasil Pengujian Simultan.....	51
Tabel 4.17. Koefisien Determinasi (Uji R Square).....	52



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual ..... 16
Gambar 4.1	Uji Normalitas dengan Grafik Komolgorov Smirnov-Test.. 44
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot ..... 46



## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Kuesioner Penelitian .....	61
Uji Validitas dan Reliabilitas Data.....	64
Uji Asumsi Klasik .....	68
Analisis Regresi Linier Berganda .....	70
Tabulasi Data Variabel Pernyataan Responden .....	71



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Ridha-Nya serta tidak lupa shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai”**.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini salah satu sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti akan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di sisi lain, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat guna meraih gelar sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang, Ayahanda Nazaruddin dan ibunda Muslyna Herlina Siregar. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini
2. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.

4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Hery Syahril, SE, Msi.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, Msi, CA.
6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
9. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
10. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
11. Pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak SUMUT I yang telah mengizinkan dan menerima peneliti untuk mengadakan penelitian ini.

12. Bapak Salom P. Panggabean selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Binjai yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.
13. Seluruh Pegawai KPP Pratama Binjai yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
14. Kakak tersayang, Iqlyma Lestari Nasution, SE. dan Elvidayani Nasution, SH. Terima kasih banyak untuk setiap bantuan, dukungan yang sudah diberikan dan selalu menemani peneliti dalam setiap urusan penelitian.
15. Abang tersayang, Raja Putra Idaman. Terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian yang sudah diberikan. Terima kasih karena selalu meningkatkan apabila ada kesalahan yang peneliti lakukan.
16. Sahabat-sahabat peneliti Hidir Muharram Lubis, Kevin Pratama, Farhan Farrazi, Iren Faurissa, Indah Safitri, yang telah bersedia mendengarkan keluh-kesah serta dukungan dan semangat yang diberikan. Dan teman-teman yang selalu menemani peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka.
17. Arini Yuris, Sahifah Nur Lubis, Ary Juanda, Mahadir Aviv Nasution, Azhami Maulana, Muhammad Habaeb beserta teman-teman angkatan 2015 lainnya yang selalu menemani peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka.
18. Teman-teman Akuntansi Grup A Stambuk 2015 yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.



19. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulisan skripsi ini peneliti harapkan dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak. Terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Medan, September 2019

Peneliti

**Bagas Svahputra**  
**NPM: 15.833.0055**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Uraian Teori .....	7
2.2. Reformasi Administrasi Perpajakan .....	9
2.2.1 Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan .....	10
2.2.2 Indikator Reformasi Administrasi Perpajakan .....	11
2.3. Pengetahuan Perpajakan .....	11
2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan .....	12
2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	12
2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	12
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	13
2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	14
2.5. Penelitian Terdahulu .....	14
2.6. Kerangka Konseptual .....	15
2.7. Hipotesis Penelitian .....	17

**BAB III:METODE PENELITIAN..... 18**

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
3.2. Populasi dan Sampel.....	19
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	20
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6. Teknik Analisa Data.....	23

**BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....31**

4.1. Gambaran Umum Penelitian.....	31
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
4.2. Hasil Penelitian.....	33
4.2.1.Deskripsi Data Responden.....	33
4.2.2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	35
4.2.3.Analisis Data.....	40
4.2.3.1 Uji Kualitas Data.....	40
4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
4.2.3.4 Uji Hipotesis.....	48
4.3. Pembahasan.....	53
4.3.1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	53
4.3.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	54
4.3.3. Pengaruh Secara Simultan.....	55

**BAB V:KESIMPULAN DAN SARAN .....56**

5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA..... 59**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3.1. Rincian Waktu Penelitian .....	19
Tabel 4.1. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	33
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	33
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	34
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	34
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi WP .....	35
Tabel 4.6. Tabulasi Reformasi Administrasi Perpajakan .....	36
Tabel 4.7. Tabulasi Pengetahuan Perpajakan .....	37
Tabel 4.8. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	39
Tabel 4.9. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X1 Reformasi Administrasi Perpajakan .....	40
Tabel 4.10. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X2 Pengetahuan Perpajakan .....	41
Tabel 4.11. Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	42
Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas masing-masing Variabel .....	43
Tabel 4.13. Uji Multikolinearitas .....	45
Tabel 4.14. Output Uji Regresi Linier Berganda .....	47
Tabel 4.15. Hasil Pengujian Parsial .....	49
Tabel 4.16. Hasil Pengujian Simultan .....	51
Tabel 4.17. Koefisien Determinasi (Uji R Square) .....	52

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual ..... 16
Gambar 4.1	Uji Normalitas dengan Grafik Komolgorov Smirnov-Test ..44
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot .....46





## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Kuesioner Penelitian .....	61
Uji Validitas dan Reliabilitas Data .....	64
Uji Asumsi Klasik .....	68
Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
Tabulasi Data Variabel Pernyataan Responden .....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Membayar pajak adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang dalam sebuah negara terutama di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak dilematika mengenai pajak baik dalam kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting adalah dalam bidang administrasinya. Masalah ini seharusnya benar-benar diperhatikan untuk perubahan yang lebih baik dan teratur dalam aspek perpajakan. (Riska Wijayanti dkk, 2013). Pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai berjumlah 146.749, tetapi tingkat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 sebesar 1,03% dinilai lebih rendah dari tahun 2017 yang tingkat rasio kepatuhannya sebesar 1,35% dengan jumlah WP OP yang terdaftar 137,349.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang

administrasi perpajakan. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi; (2) perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (3) perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia; dan (4) pelaksanaan *good governance*. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP,2007).

Kepatuhan wajib pajak telah diupayakan dengan mengubah reformasi administrasi perpajakan. Menurut Asri Fika Agusti dkk (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat,dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi

system informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada para wajib pajak (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak). Oleh karena itu, sudah semestinya KPP memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Karena pelayanan merupakan kata kunci untuk melaksanakan tugas yang di emban oleh fiskus (Wawan Hermansyah dkk, 2011). Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga mengemban perkerjaan untuk mengubah citra yang selama ini terbentuk di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mengurus pajak itu susah, prosedurnya berbelit-belit. Tuntutan akan perbaikan-perbaikan dan perubahan segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya Reformasi Perpajakan dari waktu ke waktu. Perbaikan ini berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan Reformasi Administrasi Perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas. Dengan demikian potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan dan manfaatnya, tidak mungkin orang

secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012). Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan menjadi penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan dan bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap pajak. Masalah perpajakan dalam administrasi dan pengetahuan perpajakan ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti, dengan alasan sebagai pijakan dalam meningkatkan ketertiban pajak kearah yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
3. Apakah reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dalam ilmu perpajakan dibidang reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pada KPP Pratama Binjai.

### 2. Bagi KPP Pratama Binjai

Memberikan bukti mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan oleh KPP Pratama Binjai dalam pengambilan keputusan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi informasi yang menginspirasi serta sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Membayar pajak adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang dalam sebuah negara terutama di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak dilematika mengenai pajak baik dalam kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting adalah dalam bidang administrasinya. Masalah ini seharusnya benar-benar diperhatikan untuk perubahan yang lebih baik dan teratur dalam aspek perpajakan. (Riska Wijayanti dkk, 2013). Pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Binjai berjumlah 146.749, tetapi tingkat rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2018 sebesar 1,03% dinilai lebih rendah dari tahun 2017 yang tingkat rasio kepatuhannya sebesar 1,35% dengan jumlah WP OP yang terdaftar 137,349.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang

administrasi perpajakan. Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan. Adapun konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, yaitu: (1) restrukturisasi organisasi; (2) perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; (3) perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia; dan (4) pelaksanaan *good governance*. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP,2007).

Kepatuhan wajib pajak telah diupayakan dengan mengubah reformasi administrasi perpajakan. Menurut Asri Fika Agusti dkk (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat,dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi

system informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada para wajib pajak (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak). Oleh karena itu, sudah semestinya KPP memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Karena pelayanan merupakan kata kunci untuk melaksanakan tugas yang di emban oleh fiskus (Wawan Hermansyah dkk, 2011). Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga mengemban perkerjaan untuk mengubah citra yang selama ini terbentuk di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mengurus pajak itu susah, prosedurnya berbelit-belit. Tuntutan akan perbaikan-perbaikan dan perubahan segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya Reformasi Perpajakan dari waktu ke waktu. Perbaikan ini berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan Reformasi Administrasi Perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas. Dengan demikian potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Selain itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan dan manfaatnya, tidak mungkin orang



secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012). Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan menjadi penting, karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan dan bagaimana pemahaman wajib pajak terhadap pajak. Masalah perpajakan dalam administrasi dan pengetahuan perpajakan ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti, dengan alasan sebagai pijakan dalam meningkatkan ketertiban pajak kearah yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Binjai”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?
3. Apakah reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dalam ilmu perpajakan dibidang reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pada KPP Pratama Binjai.

### 2. Bagi KPP Pratama Binjai

Memberikan bukti mengenai pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan oleh KPP Pratama Binjai dalam pengambilan keputusan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi informasi yang menginspirasi serta sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Uraian Teori

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut: (Erly Suandy,2008:10) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum,” dengan penjelasan berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8. Definisi tersebut dapat berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Sedangkan dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Arti penting sebuah pajak adalah sebagai pemasukan terhadap kas negara. Adapun fungsi pajak sendiri adalah: (Syahrudin, 2012:8)

- a. Fungsi budgeter; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi reguler; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
- d. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.



## 2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam ensiklopedia perpajakan yang disebut dengan administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. (Sophar Lumbantoruan, 1997:582). Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Asri Fika Agusti dkk (2001), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- d. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Administrasi perpajakan akan efektif jika keempat permasalahan diatas dapat diselesaikan. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

### 2.2.1 Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Riska Wijayanti dkk (2013:37), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan demi kemudahan dan kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran reformasi administrasi pajak sendiri adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Elemen dasar dalam reformasi administrasi perpajakan mempunyai beberapa syarat antara lain:

- a. Komitmen politik yang berkelanjutan
- b. Staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang
- c. Strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- e. Tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup

Jika kelima syarat tersebut terpenuhi maka reformasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Riska Wijayanti dkk (2013:8) menyatakan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi

perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.

### **2.2.2 Indikator Reformasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Nasucha (2004:37) adapun indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan:

- a. Pembinaan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- b. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- c. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- d. Perubahan metode operasi dan informasi

## **2.3 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak

akan semakin tinggi apabila pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak (Supriyatidan Nur Hidayah, 2008).

### **2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan.

### **2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2009) adapun indikator yang terkait dengan pengetahuan perpajakan:

- a. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- b. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- c. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- d. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- e. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut RiskaWijayanti dkk (2013:9) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Besarnya jurang kepatuhan yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial

dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak maka jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

#### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:18), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak telah diupayakan dengan mengubah reformasi administrasi perpajakan. Menurut Asri Fika Agusti dkk (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakanyang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:5), ketika sistem perpajakan suatu Negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan sangat penting dalam reformasi perpajakan, dan mungkin lebih penting daripada perubahan structural dalam sistem perpajakan.



## 2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Christina dan Kepramareni (2012) adapun indikator yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak:

- a. Wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri
- b. Wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu
- c. Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan
- d. Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Penelitian Ivone Kartikaputri (2013).	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak	X1 Reformasi Administrasi Perpajakan Y1 Kinerja Pelayanan Perpajakan Y2 Kepatuhan Wajib Pajak	Reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakdi KPP Pratama Yogyakarta
2.	Stefani Gita Cakti (2010).	Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman	X1 Pengetahuan Wajib Pajak X2 Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak menunjukan kurang memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak

3.	Delli Maria (2013).	Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung.	X1 Modernisasi Sistem administrasi perpajakan Y Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Berdasarkan uji statistik koefisien determinasi memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 13,3 %.
----	---------------------	---	--	--

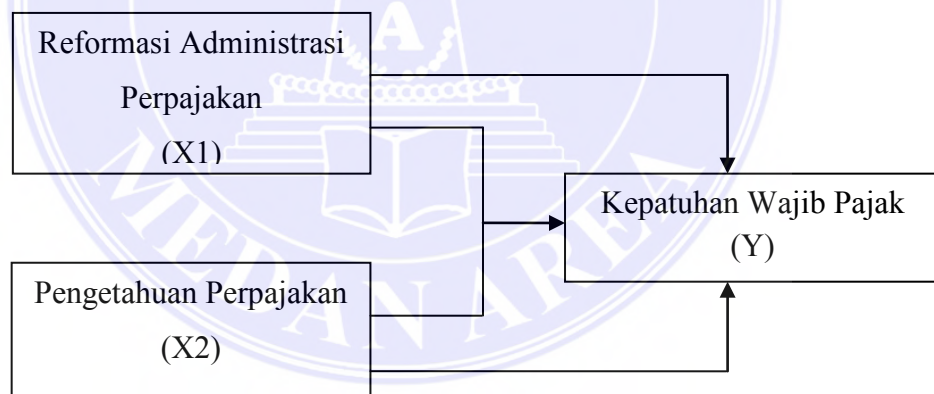
## 2.6 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel yang akan diteliti tersebut dapat dijelaskan melalui suatu model yang disebut dengan paradigma penelitian atau model penelitian (Sugiyono, 2009:63). Reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ivone Kartika putri (2013), Lasnofa Fasmi dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa reformasi

administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan bentuk pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, dimana setiap wajib pajak harus memahami prosedur dan penyetoran pelaporan pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Stefani Gita Cakti (2010) bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mendorong WP OP untuk sadar atas kewajiban perpajakan yang melekat pada WP OP sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun model penelitian ini kedalam model penelitian seperti gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

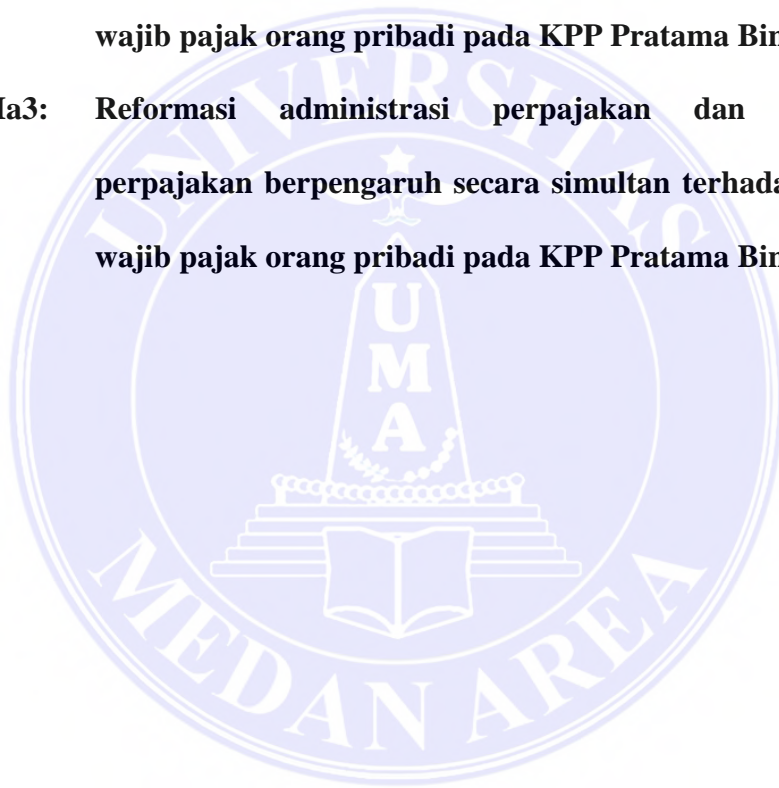
## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Ha1: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**

**Ha2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**

**Ha3: Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Uraian Teori

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut: (Erly Suandy,2008:10) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum,” dengan penjelasan berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, 1974, halaman 8. Definisi tersebut dapat berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus-nya” digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Sedangkan dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah



kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Arti penting sebuah pajak adalah sebagai pemasukan terhadap kas negara. Adapun fungsi pajak sendiri adalah: (Syahrudin, 2012:8)

- a. Fungsi budgeter; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi reguler; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
- d. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

## 2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan.

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam ensiklopedia perpajakan yang disebut dengan administrasi perpajakan (*Tax Administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. (Sophar Lumbantoruan, 1997:582). Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Asri Fika Agusti dkk (2001), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*).
- b. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- d. Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*).

Administrasi perpajakan akan efektif jika keempat permasalahan diatas dapat diselesaikan. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *tax ratio* akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

### 2.2.1 Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Riska Wijayanti dkk (2013:37), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil maka dibutuhkan struktur pajak yang disederhanakan demi kemudahan dan kepatuhan. Selain itu strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, dan komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Sasaran reformasi administrasi pajak sendiri adalah meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Elemen dasar dalam reformasi administrasi perpajakan mempunyai beberapa syarat antara lain:

- a. Komitmen politik yang berkelanjutan
- b. Staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang
- c. Strategi yang tepat dan didefinisikan dengan baik karena tidak ada strategi yang cocok untuk semua negara
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- e. Tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup

Jika kelima syarat tersebut terpenuhi maka reformasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Riska Wijayanti dkk (2013:8) menyatakan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi

perpajakan, yaitu untuk mensinergikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.” Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal, antara lain item-item yang tidak dimasukkan dalam dasar pengenaan pajak, pembelanjaan dan pelayanan publik. Dalam ekonomi yang mulai berkembang, administrasi perpajakan harus difokuskan kepada wajib pajak besar secara maksimal dan memberikan kontribusi kepada wajib pajak kecil.

### **2.2.2 Indikator Reformasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Nasucha (2004:37) adapun indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan:

- a. Pembinaan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- b. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- c. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- d. Perubahan metode operasi dan informasi

## **2.3 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak

akan semakin tinggi apabila pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak (Supriyatidan Nur Hidayah, 2008).

### **2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan.

### **2.3.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2009) adapun indikator yang terkait dengan pengetahuan perpajakan:

- a. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- b. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- c. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- d. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- e. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut RiskaWijayanti dkk (2013:9) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Besarnya jurang kepatuhan yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial



dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak maka jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

#### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:18), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak telah diupayakan dengan mengubah reformasi administrasi perpajakan. Menurut Asri Fika Agusti dkk (2001), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi reformasi administrasi perpajakanyang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Lasnofa Fasmi dkk (2013:5), ketika sistem perpajakan suatu Negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Peningkatan kepatuhan sangat penting dalam reformasi perpajakan, dan mungkin lebih penting daripada perubahan structural dalam sistem perpajakan.

## 2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Christina dan Kepramareni (2012) adapun indikator yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak:

- a. Wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri
- b. Wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu
- c. Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan
- d. Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Penelitian Ivone Kartikaputri (2013).	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak	X1 Reformasi Administrasi Perpajakan Y1 Kinerja Pelayanan Perpajakan Y2 Kepatuhan Wajib Pajak	Reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakdi KPP Pratama Yogyakarta
2.	Stefani Gita Cakti (2010).	Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sleman	X1 Pengetahuan Wajib Pajak X2 Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak menunjukan kurang memahami peraturan daerah yang mengatur tentang pajak

3.	Delli Maria (2013).	Pengaruh Modernisasi Sistem administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung.	X1 Modernisasi Sistem administrasi perpajakan Y Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Berdasarkan uji statistik koefisien determinasi memberi arti bahwa perubahan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 13,3 %.
----	---------------------	---	--	--

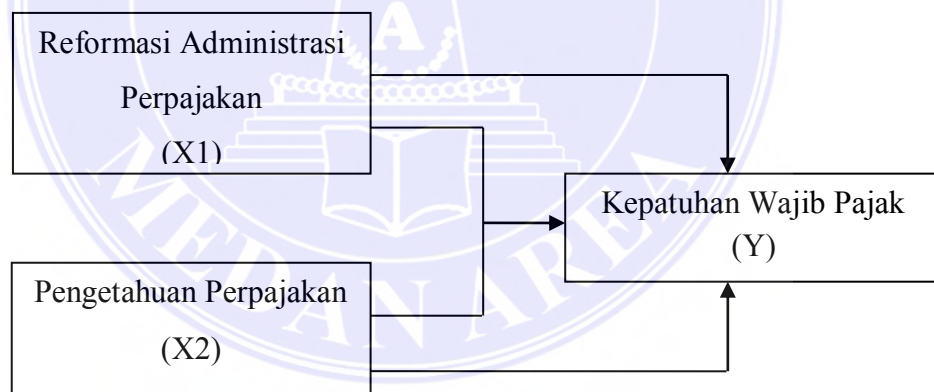
## 2.6 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel yang akan diteliti tersebut dapat dijelaskan melalui suatu model yang disebut dengan paradigma penelitian atau model penelitian (Sugiyono, 2009:63). Reformasi administrasi perpajakan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya pegawai pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ivone Kartika putri (2013), Lasnofa Fasmi dkk (2013) menunjukkan hasil bahwa reformasi

administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan bentuk pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, dimana setiap wajib pajak harus memahami prosedur dan penyetoran pelaporan pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Stefani Gita Cakti (2010) bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mendorong WP OP untuk sadar atas kewajiban perpajakan yang melekat pada WP OP sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun model penelitian ini kedalam model penelitian seperti gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

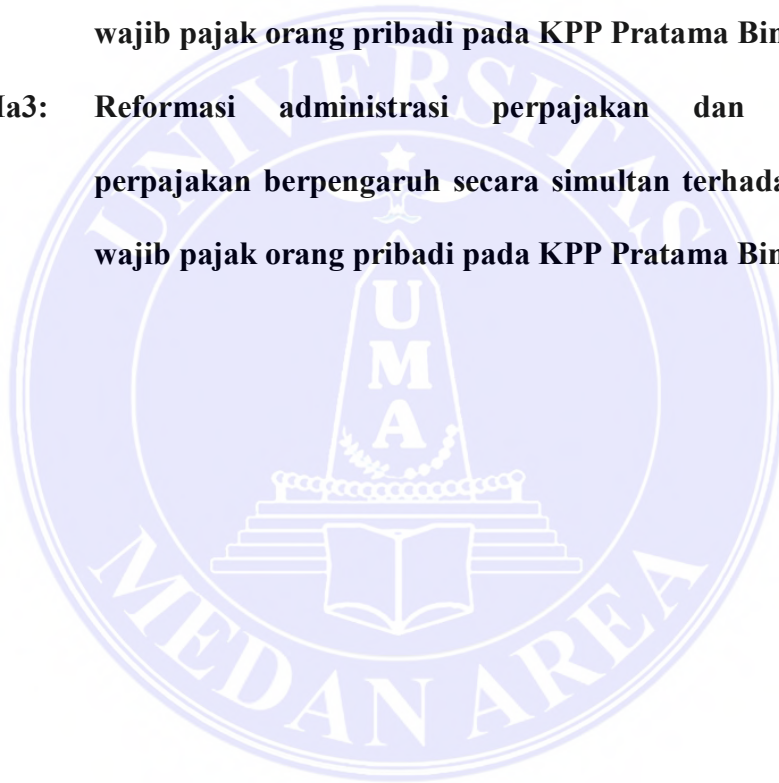
## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**Ha1: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**

**Ha2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**

**Ha3: Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai.**





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kasual. Penelitian digunakan untuk melihat hubungan pengaruh (sebab akibat), yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menguji pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai Selatan.

##### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	JenisKegiatan	2019							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept
1.	Pengajuan Judul Skripsi	■							
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■				
3.	Bimbingan Proposal		■	■	■				
4.	Seminar Proposal			■	■				
5.	Pengumpulan data dan analisis data			■	■				
6.	Penyusunan dan bimbingan Skripsi					■	■		
7.	Seminar Hasil							■	
8.	Sidang Meja Hijau								■

### 3.2 Populasi Dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2018 di KPP Pratama Binjai sebanyak 146.749.

#### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2011). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden dengan Sampling Insidental (*accidental sampling*). *Accidental Sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel sebagai sumber data.

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

#### a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Sugiono, 2016 : 39). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah:

#### 1. Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis, dan

cepat. Dalam hal ini berarti apabila semakin adanya reformasi administrasi perpajakan yang semakin baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Nasucha (2004:37) dalam Angkoso (2010) adapun indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan:

- a) Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- b) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- c) Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- d) Perubahan metode operasi dan informasi

## 2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Pengaruh aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.

Menurut Mardiasmo (2009) adapun indikator yang terkait dengan pengetahuan perpajakan:

- a) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- b) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- c) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- d) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- e) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono 2016 : 39). Dalam penelitian ini variabel terikatnya yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan ketaatan, dan mengikuti aturan-aturan perpajakan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Christina dan Kepramareni, 2012) dalam (Susilawati dan Budiarta, 2013) adapun indikator yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak:

- a) Wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri
- b) Wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu
- c) Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan
- d) Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

a. Data Kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau data yang dapat dihitung dengan satuan bilangan.



### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang amat efisien jika peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Uji validitas data merupakan uji yang berkaitan dengan isi atau materi suatu alat uji atau instrumen, apakah suatu alat uji atau instrumen telah memuat semua pernyataan yang relevan. Validitas (validity) menunjukkan kecermatan alat ukur suatu tes mengukur apa

yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya.

Pengukur dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar (Ghozali, 2006). Untuk mengukur suatu validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan rumus korelasi Products momen person. Apabila koefisien yang diperoleh mempunyai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan butir tersebut valid (Sugiyono, 2010).

#### b. Uji Realibilitas

Ujirealiabilitas data merupakan uji kualitas data yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel. Realiabilitas (reliability) suatu pengukur menunjukkan stabilisasi dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep. Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten (Ghozali, 2006).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Danang Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut: Selain

uji asumsi klasik multikolinieritas dan uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.”

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi dan atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih dari independen.

3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:

a) *tolerance valued* lawannya

b) *Variance Inflation Faktor* (VIF)

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

1) *Tolerance value*  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$  : terjadi multikolinearitas.

2) *Tolerance value*  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$  : tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

1. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). (Ghozali, 2013, hal. 96) mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Model Analisis Regresi Berganda dalam penelitian ini adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X<sub>1</sub> = Reformasi administrasi perpajakan

X<sub>2</sub> = Pengetahuan perpajakan

a = konstanta

b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> = koefisien regresi untuk variabel

e = faktor pengganggu atau standar eror



### 3.6.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

#### a. Uji Statistik t (Parsial)

Pengujian Parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dan  $t$  tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika  $t$  hitung  $> t$  tabel untuk  $\alpha = 5\%$
2.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $t$  hitung  $< t$  tabel untuk  $\alpha = 5\%$

#### b. Uji F (Simultan)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < 0,005 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ , artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2.  $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ , artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Level of signifikan = 5% (0,05).

c. Uji Koefisien Determinasi

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol ( $r^2$ ) dan koefisien korelasi diberi symbol  $r$ . Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi ( $r^2$ ) dari hasil regresi sederhana menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai  $r^2$  terletak pada nilai 0 sampai dengan 1 ( $0 < r^2 < 1$ ). Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan.

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain

semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kasual. Penelitian digunakan untuk melihat hubungan pengaruh (sebab akibat), yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menguji pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Binjai.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai Selatan.

##### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019.

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	JenisKegiatan	2019							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept
1.	Pengajuan Judul Skripsi	■							
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■				
3.	Bimbingan Proposal		■	■	■				
4.	Seminar Proposal			■	■				
5.	Pengumpulan data dan analisis data			■	■				
6.	Penyusunan dan bimbingan Skripsi					■	■		
7.	Seminar Hasil							■	
8.	Sidang Meja Hijau								■

### 3.2 Populasi Dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2018 di KPP Pratama Binjai sebanyak 146.749.

#### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin



mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2011). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden dengan Sampling Insidental (*accidental sampling*). *Accidental Sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel sebagai sumber data.

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

#### a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Sugiono, 2016 : 39). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah:

#### 1. Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar efisien, ekonomis, dan

cepat. Dalam hal ini berarti apabila semakin adanya reformasi administrasi perpajakan yang semakin baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Nasucha (2004:37) dalam Angkoso (2010) adapun indikator yang terkait dengan reformasi administrasi perpajakan:

- a) Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan
- b) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan
- c) Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
- d) Perubahan metode operasi dan informasi

## 2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Pengaruh aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.

Menurut Mardiasmo (2009) adapun indikator yang terkait dengan pengetahuan perpajakan:

- a) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- b) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- c) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
- d) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- e) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

## b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono 2016 : 39). Dalam penelitian ini variabel terikatnya yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melakukan ketaatan, dan mengikuti aturan-aturan perpajakan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Christina dan Kepramareni, 2012) dalam (Susilawati dan Budiarta, 2013) adapun indikator yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak:

- a) Wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri
- b) Wajib pajak membayar pajak dan melakukan pelaporan dengan tepat waktu
- c) Wajib pajak membayar pajak dalam jumlah yang sesuai peraturan
- d) Wajib pajak melaksanakan peraturan pajak yang berlaku

## 3.4 Jenis Dan Sumber Data

### 3.4.1 Jenis Data

#### a. Data Kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau data yang dapat dihitung dengan satuan bilangan.

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang amat efisien jika peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Uji validitas data merupakan uji yang berkaitan dengan isi atau materi suatu alat uji atau instrumen, apakah suatu alat uji atau instrumen telah memuat semua pernyataan yang relevan. Validitas (validity) menunjukkan kecermatan alat ukur suatu tes mengukur apa

yang seharusnya diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sarannya.

Pengukur dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar (Ghozali, 2006). Untuk mengukur suatu validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan rumus korelasi Products momen person. Apabila koefisien yang diperoleh mempunyai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan butir tersebut valid (Sugiyono, 2010).

#### b. Uji Realibilitas

Ujirealiabilitas data merupakan uji kualitas data yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel. Realiabilitas (reliability) suatu pengukur menunjukkan stabilisasi dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep. Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten (Ghozali, 2006).

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Danang Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut: Selain



uji asumsi klasik multikolinieritas dan uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.”

#### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi dan atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih dari independen.

3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:

a) *tolerance valued* lawannya

b) *Variance Inflation Faktor* (VIF)

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

1) *Tolerance value*  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$  : terjadi multikolinearitas.

2) *Tolerance value*  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$  : tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

1. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). (Ghozali, 2013, hal. 96) mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Model Analisis Regresi Berganda dalam penelitian ini adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X<sub>1</sub> = Reformasi administrasi perpajakan

X<sub>2</sub> = Pengetahuan perpajakan

a = konstanta

b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> = koefisien regresi untuk variabel

e = faktor pengganggu atau standar eror

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam tabel dan angka metode statistik sebagai berikut:

#### a. Uji Statistik t (Parsial)

Pengujian Parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dan  $t$  tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika  $t$  hitung  $> t$  tabel untuk  $\alpha = 5\%$
2.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $t$  hitung  $< t$  tabel untuk  $\alpha = 5\%$

#### b. Uji F (Simultan)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < 0,005 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

1.  $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ , artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2.  $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$ , artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Level of signifikan = 5% (0,05).

c. Uji Koefisien Determinasi

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol ( $r^2$ ) dan koefisien korelasi diberi symbol  $r$ . Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi ( $r^2$ ) dari hasil regresi sederhana menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai  $r^2$  terletak pada nilai 0 sampai dengan 1 ( $0 < r^2 < 1$ ). Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan.

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain



semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika reformasi administrasi perpajakan mengalami kenaikan, maka dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,656.
- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan, maka dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,397. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika variabel X1 (reformasi administrasi perpajakan) dan variabel X2 (pengetahuan perpajakan) mengalami kenaikan, maka dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan juga.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

### a. Bagi KPP Pratama Binjai

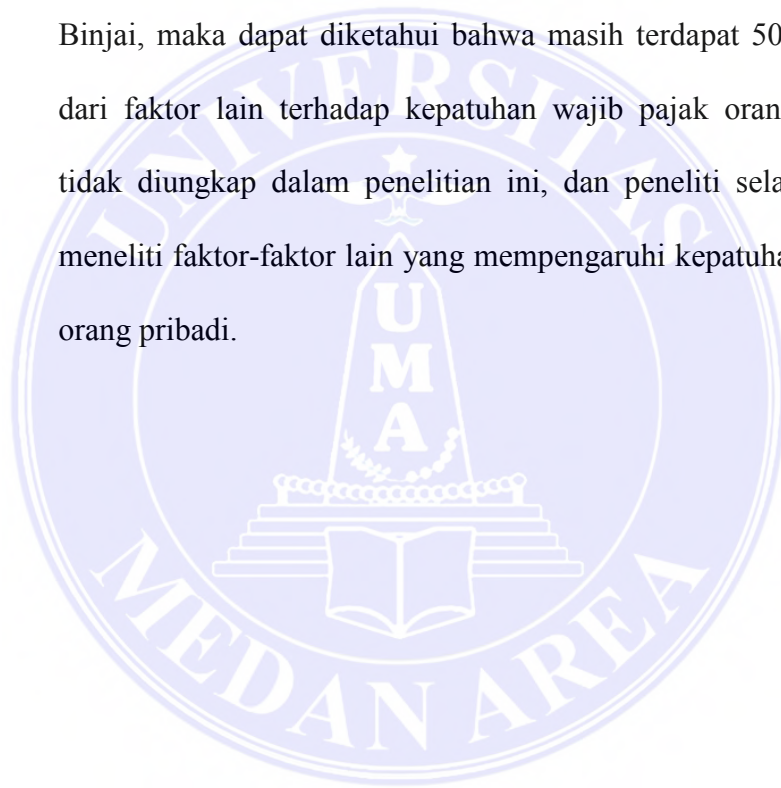
Dalam hal ini KPP Pratama Binjai perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang lebih menarik, efektif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

### b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan memperluas wilayah penelitan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 49,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 50,1% pengaruh dari faktor lain terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak diungkap dalam penelitian ini, dan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat



#### 4. KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu :

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai:

“Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai:

1. Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai- nilai Kementerian Keuangan.
2. Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang – Undang Perpajakan secara adil.
3. Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Data Responden

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 50 WP OP dan semuanya dikembalikan sehingga validitas angket mencapai 100%.

**Tabel 4.1**  
**Rincian penyebaran dan pengembalian kuisisioner**

Keterangan	Jumlah	Persentasi(%)
Total kuisisioner yang disebar	50	100
Total kuisisioner yang dikembalikan	50	100

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah 2019)

Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, dan Lama Menjadi WP. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a. Jenis kelamin

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	38	76%
Perempuan	12	24%
Total	50	100%

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 38 orang (76%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang (24%).

b. Usia

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
22-32	7	14%
33-43	19	38%
44-54	13	26%
>54	11	22%
Total	50	100%

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 22-32 tahun sebanyak 7 orang (14%), dilanjutkan dengan usia 33-43 tahun sebanyak 19 orang (38%), dilanjutkan dengan usia 43-54 tahun sebanyak 13 orang (26%), dan yang berusia >54 sebanyak 11 orang (22%).

c. Pendidikan

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	12	24%
Diploma (D3)	3	6%
Sarjana (S1)	14	28%
Magister (S2)	21	42%
Total	50	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat jenjang pendidikan Magister yaitu sebanyak 21 orang (42%), jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 14 orang (28%),

jenjang pendidikan Diploma sebanyak 3 orang (6%), dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 12 orang (24%).

d. Lama Menjadi WP

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi WP**

Lama Menjadi WP	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	16	32%
6-10 tahun	23	46%
> 10 tahun	11	22%
Total	50	100%

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa lama menjadi WP responden dalam penelitian ini adalah yang 1-5 tahun sebanyak 16 orang (32%), 6-10 tahun sebanyak 23 orang (46%), dan yang > 10 tahun sebanyak 11 orang (22%).

#### 4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu: Reformasi Administrasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala *likert*.

a. Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan

**Tabel 4.6**  
**Tabulasi Reformasi Administrasi Perpajakan**

No.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	10	20%	38	76%	2	4%	0	0	0	0	50	100%
2	13	26%	37	74%	0	0	0	0	0	0	50	100%
3	19	38%	29	58%	2	4%	0	0	0	0	50	100%
4	15	30%	34	68%	1	2%	0	0	0	0	50	100%
5	9	18%	37	74%	4	8%	0	0	0	0	50	100%
6	19	38%	30	60%	1	2%	0	0	0	0	50	100%
7	15	30%	35	70%	0	0	0	0	0	0	50	100%
8	21	42%	29	58%	0	0	0	0	0	0	50	100%

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah 2019)

Berdasarkan Tabulasi jawaban dari 50 responden diatas, maka dapat diuraikan :

- 1) Pernyataan pada butir 1: Petugas KPP telah membantu sesuai dengan prosedur, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 38 orang (76%).
- 2) Pernyataan pada butir 2: Waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 37 orang (74%).
- 3) Pernyataan pada butir 3: Prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 29 orang (58%).
- 4) Pernyataan pada butir 4: Pelayanan dan pemeriksaan melalui progam komputerisasi seperti pelaporan pajak (*e-filing*, *e-SPT online*) telah



dijalankan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 34 orang (68%).

- 5) Pernyataan pada butir 5: Formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 37 orang (74%).
- 6) Pernyataan pada butir 6: Pelayanan dan pemeriksaan telah sesuai dengan permintaan publik, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 30 orang (60%).
- 7) Pernyataan pada butir 7: Petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 35 orang (70%).
- 8) Pernyataan pada butir 8: Petugas pajak kompeten dalam tugasnya, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 29 orang (58%).

b. Variabel Pengetahuan Perpajakan

**Tabel 4.7**  
**Tabulasi Pengetahuan Perpajakan**

No.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	9	18%	37	74%	4	8%	0	0	0	0	50	100%
2	16	32%	33	66%	1	2%	0	0	0	0	50	100%
3	14	28%	32	64%	4	8%	0	0	0	0	50	100%
4	10	20%	32	64%	8	16%	0	0	0	0	50	100%
5	9	18%	35	70%	6	12%	0	0	0	0	50	100%

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah 2019)

Berdasarkan Tabulasi jawaban dari 50 responden diatas, maka dapat diuraikan :

- 1) Pernyataan pada butir 1: Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame dan media cetak lainnya, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 37 orang (74%).
- 2) Pernyataan pada butir 2: Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 33 orang (66%).
- 3) Pernyataan pada butir 3: Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 32 orang (64%).
- 4) Pernyataan pada butir 4: Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 32 orang (64%).
- 5) Pernyataan pada butir 5: Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 35 orang (70%).

c. Variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Tabel 4.8**  
**Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

No.	Jawaban Responden											
	SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	R	%
1	27	54%	23	46%	0	0	0	0	0	0	50	100%
2	16	32%	34	68%	0	0	0	0	0	0	50	100%
3	29	58%	21	42%	0	0	0	0	0	0	50	100%
4	26	52%	22	44%	2	4%	0	0	0	0	50	100%
5	25	50%	25	50%	0	0	0	0	0	0	50	100%
6	31	62%	19	38%	0	0	0	0	0	0	50	100%

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah 2019)

Berdasarkan Tabulasi jawaban dari 50 responden diatas, maka dapat diuraikan :

- 1) Pernyataan pada butir 1: Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), WP mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP ataupun dari situs online yang disediakan DJP, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 27 orang (54%).
- 2) Pernyataan pada butir 2: WP selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mayoritas responden menjawab Setuju sebanyak 34 orang (68%).
- 3) Pernyataan pada butir 3: WP selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 29 orang (58%).
- 4) Pernyataan pada butir 4: WP selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 26 orang (52%).

- 5) Pernyataan pada butir 5: WP selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju dan Setuju sebanyak 25 orang (50%).
- 6) Pernyataan pada butir 6: WP selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas responden menjawab Sangat Setuju sebanyak 31 orang (62%).

### 4.2.3 Analisis Data

#### 4.2.3.1 Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan melihat “korelasi antara skor faktor dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor), kemudian membandingkan r hitung dengan r tabel dari setiap item pertanyaan dengan signifikan 0,05” (Sugiyono, 2010:267).

**Tabel 4.9**  
**Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X1**  
**Reformasi Administrasi Perpajakan**

Item	<i>Corrected item total correation (rhitung)</i>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
X1.P1	0,534	0,278	Valid
X1.P2	0,426	0,278	Valid
X1.P3	0,321	0,278	Valid
X1.P4	0,350	0,278	Valid
X1.P5	0,315	0,278	Valid
X1.P6	0,592	0,278	Valid

X1.P7	0,424	0,278	Valid
X1.P8	0,388	0,278	Valid

Sumber: Hasil Pengeolahan Data Primer dengan SPSS 21.00, 2019 (data diolah).

Berdasarkan pada tabel 4.9 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5%.

**Tabel4.10**  
**Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel X2 Pengetahuan Perpajakan**

Item	<i>Corrected item total correlation (r<sub>hitung</sub>)</i>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
X2.P1	0,282	0,278	Valid
X2.P2	0,316	0,278	Valid
X2.P3	0,499	0,278	Valid
X2.P4	0,655	0,278	Valid
X2.P5	0,428	0,278	Valid

Sumber: Hasil Pengeolahan Data Primer dengan SPSS 21.00, 2019 (data diolah).

Berdasarkan pada tabel 4.10 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5%.



**Tabel 4.11**  
**Validitas Instrumen Pertanyaan Variabel Y**  
**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Item	<i>Corrected item total correlation (r<sub>hitung</sub>)</i>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
Y.P1	0,281	0,278	Valid
Y.P2	0,519	0,278	Valid
Y.P3	0,822	0,278	Valid
Y.P4	0,750	0,278	Valid
Y.P5	0,680	0,278	Valid
Y.P6	0,438	0,278	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 21.00, 2019 (data diolah).*

Berdasarkan pada tabel 4.11 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan koefisien Alpha-Cronbach. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas terhadap data penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reabilitas masing - masing Variabel**

Variabel	Cronbach's Alpha	Cutt off	Kesimpulan
Reformasi Administrasi Perpajakan	0,320	> 0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,808	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,613	> 0,60	Reliabel

*Sumber: Hasil Pengeolahan Data Primer dengan SPSS 21.00, 2019 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa semua data yang diperoleh bersifat reliabel karena nilai Cronbach's Alpha yakni 0,320, 0,808 dan 0,613 > 0,60. Hal ini menunjukkan instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian tersebut dianggap reliabel untuk dijadikan alat ukur penelitian.

#### 4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Menurut Sudaryono (2014:309), uji normalitas bertujuan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan cara menganalisis grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka dari itu model regresi memenuhi asumsi uji normalitas, demikian juga sebaliknya.

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23664176
	Absolute	,100
Most Extreme Differences	Positive	,100
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,704
Asymp. Sig. (2-tailed)		,705

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Gambar 4.1

#### Uji Normalitas dengan Grafik Komolgorov Smirnov-Test

Berdasarkan hasil grafik diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,705 > 0,05$  dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data beramsusi normal. Sehingga asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar variabel independen

(Ghozali, 2013, hal. 105). Melalui program SPSS *for windows* versi 21 dengan ketentuan berikut:

1. Jika nilai Tolerance  $> 0,01$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai Tolerance  $< 0,01$ , maka terjadi multikolinearitas.
3. Jika nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas.
4. Jika nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas

**Tabel 4.13**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,955	1,047
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,955	1,047

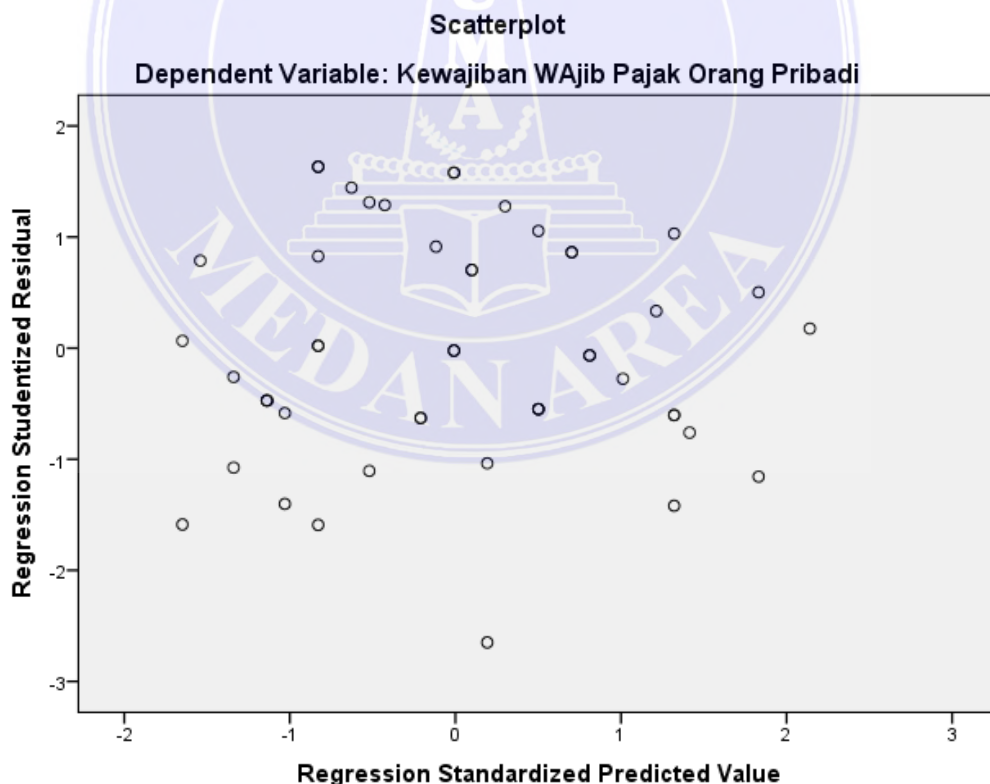
a. Dependent Variable: KEPATUHANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dibuktikan dengan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,01% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nilai tolerance lebih besar dari 0,01 yaitu reformasi administrasi perpajakan (0,955) dan pengetahuan perpajakan (0,955). Nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu nilai VIF reformasi administrasi perpajakan (1,047) dan pengetahuan perpajakan (1,047).

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut(Ghozali, 2013, hal. 142) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi dengan residualnya. Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

1. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot**



Dari gambar 4.2 bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). (Ghozali, 2013, hal. 96) mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen.

**Tabel 4.14**  
**Output Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,633	4		-,829	,411
REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,656	,111	,613	5,924	,000
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,397	,152	,271	2,620	,012

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,633 + 0,656 X_1 + 0,397 X_2 + e$$

Dimana

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X<sub>1</sub> = Reformasi Administrasi Perpajakan

X<sub>2</sub> = Pengetahuan Perpajakan

- a. Koefisien konstanta sebesar -3,633 dengan nilai negatif. Dengan nilai tersebut maka dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami penurunan sebesar -3,633 apabila masing-masing variabel X<sub>1</sub> (reformasi administrasi perpajakan) dan X<sub>2</sub> (pengetahuan perpajakan) bernilai 0 (nol).
- b. Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> (reformasi administrasi perpajakan) sebesar 0,656. Hal ini menggambarkan jika reformasi administrasi perpajakan mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,656.
- c. Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub> (pengetahuan perpajakan) sebesar 0,397. Hal ini menggambarkan jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1% dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan 0,397.

#### 4.2.3.4 Uji Hipotesis

- a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2013, hal. 98) uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig <math>\alpha</math> (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak
- 2) Jika nilai sig >  $\alpha$  (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika t hitung > t tabel untuk  $\alpha = 5\%$
- 2)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika t hitung < t tabel untuk  $\alpha = 5\%$

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Parsial**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,633	4		-,829	,411
REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN	,656	,111	,613	5,924	,000
PENGETAHUAN PERPAJAKAN	,397	,152	,271	2,620	,012

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah reformasi administrasi perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil pengujian secara parsial pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,665 > 2,011$ ) dan signifikan sebesar  $0,011 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil pengujian secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $3,236 < 2,011$ ) dan signifikan sebesar  $0,002 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan.

b. Uji Simultan ( Uji F)

Menurut (Ghozali, 2013, hal. 98) uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

- a.  $H_0 : b_1 = b_2 = 0$ , artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen
- b.  $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$ , artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Pengujian Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	80,985	2	40,493	25,397	,000 <sup>b</sup>
Residual	74,935	47	1,594		
Total	155,920	49			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN



Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $25,397 > 4,04$ ) dan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jadi secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013, hal. 97).

**Tabel 4.17**  
**Koefisien Determinasi (Uji R Square)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,721 <sup>a</sup>	,519	,499	1,263	1,702

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN PERPAJAKAN, REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan hasil pada tabel 4.17 model regresi diperoleh sebesar 0,499 atau 49,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi reformasi administrasi

perpajakan (X1) dan pengetahuan perpajakan(X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 49,9%. Sisanya sebesar 50,1% (100%-49,9%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan konsep-konsep yang ada, tampak bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik reformasi administrasi perpajakan akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Reformasi administrasi perpajakan itu antara lain membenahi fungsi pelayanan dan pemeriksaan, jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan, perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan, serta perubahan metode operasi dan informasi. Reformasi administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,924 > 2,011$ ) dan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan hipotesis H<sub>1</sub>. Hasil penelitian menyatakan bahwa

reformasi administrasi perpajakan mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibutuhkan koefisien regresi variabel reformasi administrasi perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 5,924. Hal ini menggambarkan jika reformasi administrasi perpajakan mengalami kenaikan 1% dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,656.

.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ivone (2013) yang menyatakan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai dalam menjalankan kewajibannya. Pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai pendaftaran sebagai wajib pajak, pengetahuan mengenai fungsi pajak, pengetahuan mengenai tarif pajak, dan pengetahuan mengenai tata cara pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,620 < 2,011$ ) dan signifikan sebesar  $0,012 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan sesuai hipotesis  $H_2$ . Koefisien regresi

pengetahuan perpajakan ( $X^2$ ) sebesar 0,397. Hal ini menggambarkan jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1% dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan 2,620. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Stefani Gita Cakti (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.3 Pengaruh Secara Simultan Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $25,397 > 4,04$ ) dan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jadi secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ivone (2013) dan Stefani Gita Cakti (2010) yang menyatakan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika reformasi administrasi perpajakan mengalami kenaikan, maka dengan asumsi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,656.
- b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan, maka dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,397. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Secara simultan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai. Hal ini menggambarkan jika variabel X1 (reformasi administrasi perpajakan) dan variabel X2 (pengetahuan perpajakan) mengalami kenaikan, maka dengan asumsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami kenaikan juga.



## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

### a. Bagi KPP Pratama Binjai

Dalam hal ini KPP Pratama Binjai perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara melakukan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang lebih menarik, efektif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

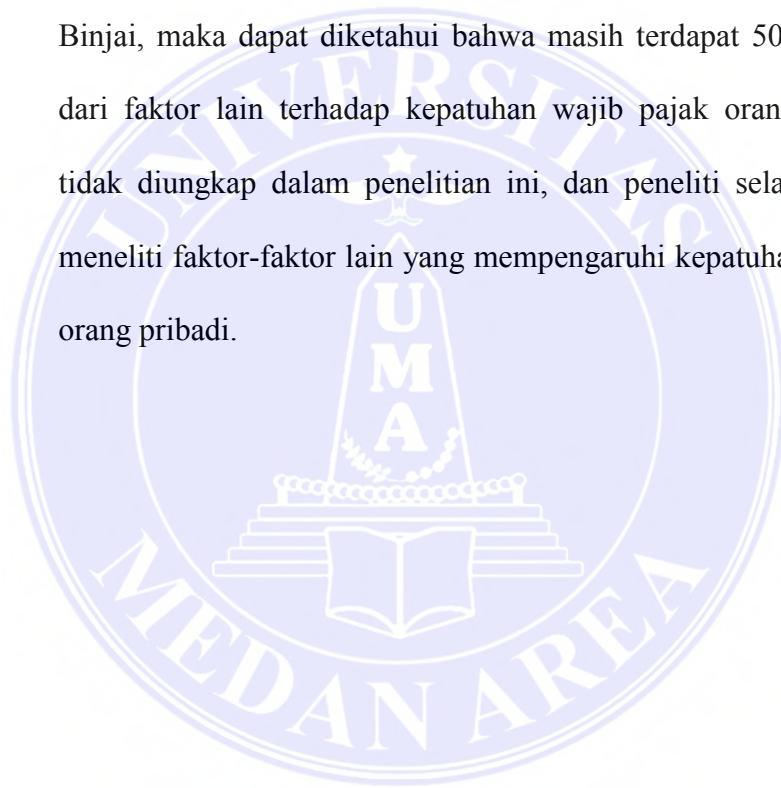
### b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan memperluas wilayah penelitan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.



c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 49,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 50,1% pengaruh dari faktor lain terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tidak diungkap dalam penelitian ini, dan peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Romandana (2010), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Udayana Bali, Jurnal EMBA
- Anggraini, Romandana. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Christina, N. K. dan P. Kepramareni. (2012). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No 2, pg. 30-49
- Puspa Arum, Harjanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2004.
- , *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, Tahun 1974.
- Apriliana, Ria. (2012). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*.
- Aminah, Siti (2014) *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.
- Euphrasia Susy Suhendra, (2011). *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Jakarta*. Jurnal ekonomi.

Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Skripsi.

Fujiyana, Yuli. (2013). *Pengaruh reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1)*

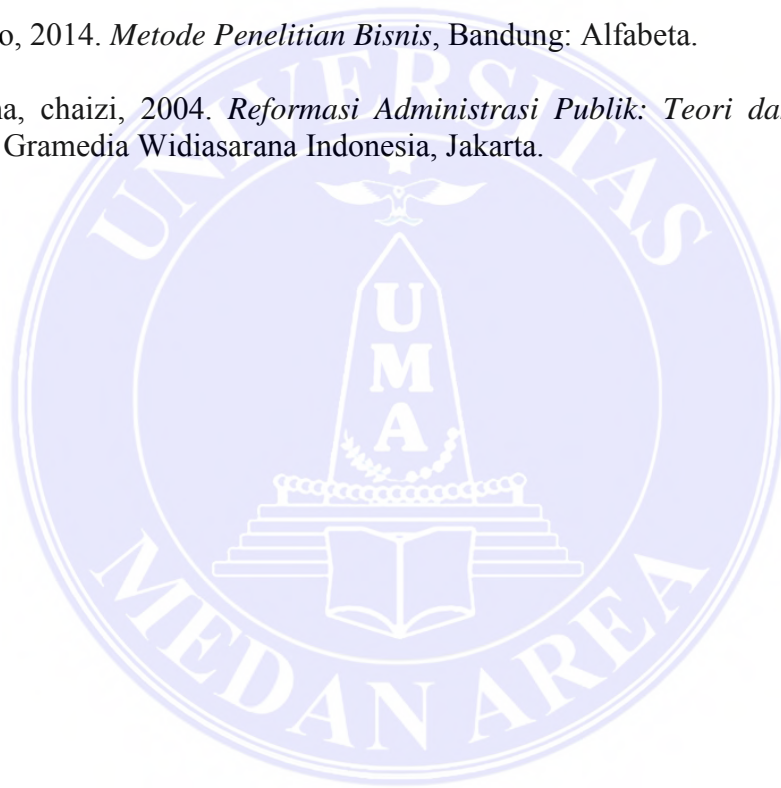
Hutagaol John, (2007). *Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu: Jakarta

Mardiasmo, (2008). *Perpajakan, Edisi Revis 2008*. Penerbit: Andi, Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*.

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Nasucha, chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.





# LAMPIRAN

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**KUESIONER PENELITIAN**

**1. Identitas Responden**

Nama : .....(boleh tidak diisi / inisial)

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Usia : .....tahun

Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  Sarjana  Magister

Jenis Pekerjaan :  PNS  Pegawai Swasta  
 Wiraswasta  Lainnya

Lama Menjadi WP :  1-5 thn  6-10thn  >10 thn

**2. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu /Saudara/i membayar pajak dengan memberi tanda ceklist (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

STS = Sangat Tidak Setuju      SS = Sangat Setuju  
TS = Tidak Setuju              KS = Kurang Setuju  
S = Setuju

### A. Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Menurut anda, petugas KPP telah membantu anda sesuai dengan prosedur.					
2.	Menurut anda, waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif.					
3.	Menurut anda, prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit.					
4.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak ( <i>e-Filing, e-SPT online</i> ) telah dijalankan.					
5.	Menurut anda, formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh.					
6.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan telah sesuai dengan permintaan publik.					
7.	Menurut anda, petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.					
8.	Menurut anda, petugas pajak kompeten dalam tugasnya.					

### B. Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame dan media cetak lainnya.					
2.	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3.	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
4.	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana.					



5.	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
----	---	--	--	--	--	--

### C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP ataupun dari situs online yang disediakan DJP.					
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
6.	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

Atas bantuan Bapak / Ibu / Saudara / i sekalian, saya ucapkan

**TERIMA KASIH**

## A. UJI VALIDITAS DATA DAN RELIABILITAS DATA

### 1). Uji Validitas

#### Validitas Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

		Correlations								Reformasi Administrasi Perpajakan
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	,091	-,056	,243	,104	,259	-,021	,231	,534**
	Sig. (2-tailed)		,532	,697	,090	,474	,069	,884	,106	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	,091	1	,131	-,059	-,027	,291*	,126	-,042	,426**
	Sig. (2-tailed)	,532		,366	,682	,850	,040	,383	,770	,002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	-,056	,131	1	-,130	,094	,061	,165	-,304*	,321*
	Sig. (2-tailed)	,697	,366		,369	,515	,672	,252	,032	,023
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	,243	-,059	-,130	1	-,277	,310*	,007	,092	,350*
	Sig. (2-tailed)	,090	,682	,369		,052	,029	,964	,524	,013
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	,104	-,027	,094	-,277	1	-,062	-,033	,235	,315*
	Sig. (2-tailed)	,474	,850	,515	,052		,671	,822	,100	,026
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Pertanyaan 6	Pearson Correlation	,259	,291*	,061	,310*	-,062	1	,075	,034	,592**
	Sig. (2-tailed)	,069	,040	,672	,029	,671		,604	,813	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 7	Pearson Correlation	-,021	,126	,165	,007	-,033	,075	1	,092	,424**
	Sig. (2-tailed)	,884	,383	,252	,964	,822	,604		,524	,002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 8	Pearson Correlation	,231	-,042	-,304*	,092	,235	,034	,092	1	,388**
	Sig. (2-tailed)	,106	,770	,032	,524	,100	,813	,524		,005
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Reformasi Adminitrasi Perpajakan	Pearson Correlation	,534**	,426**	,321*	,350*	,315*	,592**	,424**	,388**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,023	,013	,026	,000	,002	,005	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

		Correlations					Pengetahuan Perpajakan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	-,280*	-,071	,187	-,169	,282*
	Sig. (2-tailed)		,049	,626	,193	,241	,047
	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	-,280*	1	,212	-,107	-,066	,316*
	Sig. (2-tailed)	,049		,139	,460	,648	,026
	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	-,071	,212	1	,035	-,104	,499**
	Sig. (2-tailed)	,626	,139		,807	,473	,000

	N	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	,187	-,107	,035	1	,238	,655**
Pertanyaan 4	Sig. (2-tailed)	,193	,460	,807		,096	,000
	N	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	-,169	-,066	-,104	,238	1	,424**
Pertanyaan 5	Sig. (2-tailed)	,241	,648	,473	,096		,002
	N	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	,282*	,316*	,499**	,655**	,424**	1
Pengetahuan Perpajakan	Sig. (2-tailed)	,047	,026	,000	,000	,002	
	N	50	50	50	50	50	50

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	,127	,028	-,137	,040	-,061	,281
	Sig. (2-tailed)		,418	,849	,343	,782	,673	,057
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	,117	1	,323*	,397**	,000	,007	,519**
	Sig. (2-tailed)	,418		,022	,004	1,000	,961	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	,028	,323*	1	,570**	,770**	,169	,822**
	Sig. (2-tailed)	,849	,022		,000	,000	,242	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	-,137	,397**	,570**	1	,418**	,296*	,750**
	Sig. (2-tailed)	,343	,004	,000		,003	,037	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50

Pertanyaan 5	Pearson Correlation	,040	,000	,770**	,418**	1	,124	,680**
	Sig. (2-tailed)	,782	1,000	,000	,003		,392	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	-,061	,007	,169	,296*	,124	1	,438**
	Sig. (2-tailed)	,673	,961	,242	,037	,392		,001
	N	50	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation	,271	,519**	,822**	,750**	,680**	,438**	1
	Sig. (2-tailed)	,057	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	50	50	50	50	50	50	50

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2). Uji Reliabilitas

### Reliabilitas Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,320	,331	8

### Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,606	6

## Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,808	,812	5

## B. Uji ASUMSI KLASIK

### 1). Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23664176
	Absolute	,100
Most Extreme Differences	Positive	,100
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,704
Asymp. Sig. (2-tailed)		,705

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

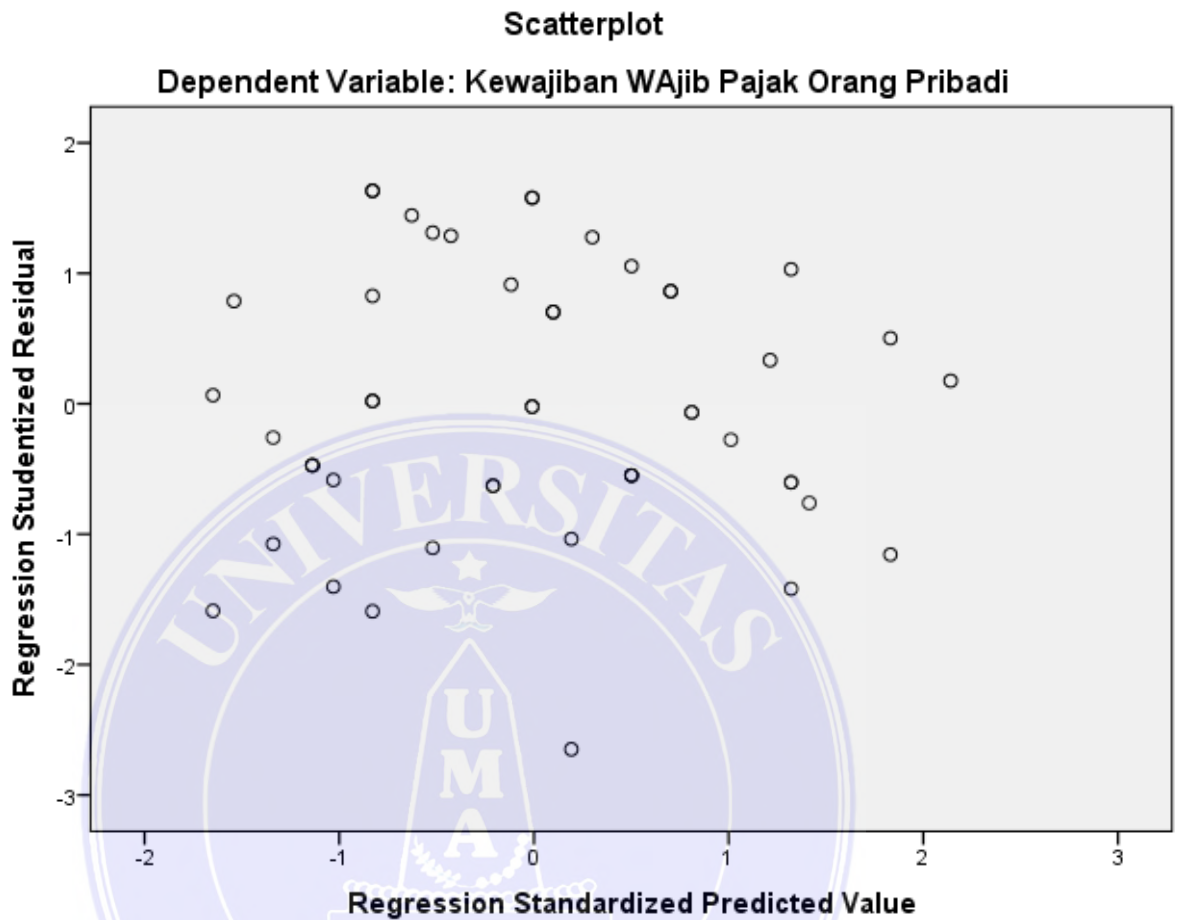
### 2). Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Reformasi Administrasi Perpajakan	,955	1,047
1 Pengetahuan Perpajakan	,955	1,047



### 3). Uji Heteroskedastisitas



## C. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

### 1). Uji Parsial (uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,633	4,384		-,829	,411		
Reformasi Administrasi Perpajakan	,656	,111	,613	5,924	,000	,955	1,047
Pengetahuan Perpajakan	,397	,152	,271	2,620	,012	,955	1,047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 2). Uji Simultan (uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	80,985	2	40,493	25,397	,000 <sup>b</sup>
Residual	74,935	47	1,594		
Total	155,920	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

## 3). Koefisien Determinasi (uji R Square)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,721 <sup>a</sup>	,519	,499	1,263	1,702

a. Predictors: (Constant), Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## DATA VARIABEL REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X1)

RESPONDEN	(X1).1	(X1).2	(X1).3	(X1).4	(X1).5	(X1).6	(X1).7	(X1).8	TOTAL (X1)
1	4	4	5	5	4	5	4	4	35
2	4	5	5	4	4	5	5	4	36
3	4	4	4	5	4	3	4	5	33
4	5	4	4	5	4	5	5	5	37
5	5	4	4	5	5	4	4	5	36
6	3	5	4	5	3	4	4	4	32
7	5	4	4	4	5	4	3	4	33
8	4	5	5	5	4	4	5	4	36
9	5	4	4	5	4	5	4	5	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	3	4	5	4	32
12	4	4	5	4	5	5	5	5	37

13	4	5	5	4	4	5	4	4	35
14	4	5	5	4	4	5	4	4	35
15	5	5	4	3	4	4	4	4	33
16	5	4	4	5	4	4	4	5	35
17	3	4	4	4	4	4	4	4	31
18	5	5	5	5	4	5	4	4	37
19	5	4	4	5	3	5	4	5	35
20	4	4	5	5	4	5	4	4	35
21	4	5	4	4	4	4	4	5	34
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	5	33
24	4	4	5	4	5	4	4	5	35
25	4	4	5	4	4	4	4	4	33
26	4	4	5	4	4	4	4	4	33
27	4	4	3	5	4	5	4	4	33
28	4	4	4	4	4	4	4	5	33
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	5	4	4	4	4	4	33
31	4	4	4	4	5	5	4	5	35
32	4	5	4	4	5	5	4	5	36
33	5	5	4	5	4	5	5	5	38
34	5	5	5	4	4	5	5	4	37
35	4	4	5	4	4	4	5	4	34
36	4	4	5	5	4	5	5	4	36
37	4	5	4	4	5	4	5	5	36
38	4	4	4	4	4	4	5	5	34
39	4	4	4	4	4	4	5	5	34
40	4	4	5	4	4	4	5	5	35
41	4	4	5	4	4	4	4	4	33
42	4	4	5	4	4	4	4	4	33
43	4	4	3	5	3	5	4	4	32
44	4	4	4	4	5	4	5	4	34
45	4	4	4	4	4	4	5	4	33
46	4	4	5	4	4	4	4	4	33
47	4	4	4	4	4	5	4	5	34
48	4	5	4	4	4	5	4	5	35
49	4	4	4	4	5	4	4	4	33
50	4	4	4	4	4	4	4	5	33

## DATA VARIABEL PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X2)

RESPONDEN	(X2).1	(X2).2	(X2).3	(X2).4	(X2).5	TOTAL (X2)
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	4	22
5	5	4	4	4	4	21
6	3	5	4	4	5	21
7	5	4	4	4	5	22
8	4	5	5	4	4	22
9	4	5	4	4	5	22
10	4	5	4	4	4	21
11	3	4	4	4	4	19
12	5	5	5	4	4	23
13	4	4	5	4	4	21
14	4	3	3	4	4	18
15	4	4	5	5	5	23
16	4	4	4	5	4	21
17	4	5	5	3	4	21
18	4	5	3	4	4	20
19	3	5	5	3	3	19
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	5	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	5	5	5	4	23
24	5	4	4	5	4	22
25	4	4	3	3	5	19
26	4	5	5	4	4	22
27	4	4	5	4	4	21
28	4	4	4	5	4	21
29	4	5	4	4	3	20
30	4	4	4	4	3	19
31	5	4	4	4	4	21
32	5	4	4	4	3	20
33	4	4	4	3	4	19
34	4	4	4	5	5	22
35	4	5	4	4	4	21
36	4	5	4	5	4	22
37	5	4	4	4	3	20
38	4	4	4	3	4	19
39	4	4	4	5	5	22

40	4	4	4	5	5	22
41	4	4	5	3	4	20
42	4	5	3	4	4	20
43	3	5	4	3	4	19
44	5	4	4	4	4	21
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	5	4	4	21
48	4	4	5	4	4	21
49	5	4	4	4	3	20
50	4	4	4	3	4	19

### DATA VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

RESPONDEN	(Y).1	(Y).2	(Y).3	(Y).4	(Y).5	(Y).6	TOTAL (Y)
1	4	4	4	4	4	4	24
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	5	4	5	4	27
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	5	5	28
6	4	4	4	4	4	5	25
7	5	4	4	4	4	5	26
8	4	5	5	4	5	4	27
9	4	4	5	5	5	5	28
10	5	4	4	3	4	4	24
11	4	4	4	3	4	4	23
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	4	4	4	5	27
14	4	4	5	5	5	5	28
15	4	4	5	5	5	5	28
16	5	4	5	4	5	4	27
17	5	4	4	4	4	5	26
18	5	4	5	5	5	5	29
19	5	4	5	5	5	4	28
20	4	4	4	5	4	5	26
21	4	4	5	4	5	5	27
22	5	4	4	4	4	4	25
23	5	4	5	4	5	5	28
24	4	4	5	5	5	5	28
25	4	4	4	4	4	5	25

26	5	4	4	4	4	5	26
27	4	4	4	4	4	5	25
28	5	4	5	4	5	5	28
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	4	4	4	4	4	25
31	4	4	5	5	5	4	27
32	5	4	5	5	5	5	29
33	5	4	5	4	5	5	28
34	4	5	5	5	4	5	28
35	5	5	5	5	4	5	29
36	4	5	5	5	4	5	28
37	5	5	5	5	5	4	29
38	5	5	5	5	4	4	28
39	4	5	5	5	5	5	29
40	4	5	5	5	5	4	28
41	4	5	5	5	4	5	28
42	5	4	4	4	4	5	26
43	4	4	4	5	4	4	25
44	4	4	4	5	5	5	27
45	5	5	4	4	4	4	26
46	5	5	4	5	4	5	28
47	5	4	5	5	5	5	29
48	5	5	5	5	5	4	29
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	4	4	4	4	4	25



## DAFTAR PUSTAKA

- Romandana (2010), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Udayana Bali, Jurnal EMBA
- Anggraini, Romandana. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Christina, N. K. dan P. Kepramareni. (2012). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No 2, pg. 30-49
- Puspa Arum, Harjanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2004.
- , *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, Tahun 1974.
- Apriliana, Ria. (2012). *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*.
- Aminah, Siti (2014) *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Surakarta*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.
- Euphrasia Susy Suhendra, (2011). *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Jakarta*. Jurnal ekonomi.

Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Skripsi.

Fujiyana, Yuli. (2013). *Pengaruh reformasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Pratama Kota Bandung di Kanwil DJP Jabar 1)*

Hutagaol John, (2007). *Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu: Jakarta

Mardiasmo, (2008). *Perpajakan, Edisi Revis 2008*. Penerbit: Andi, Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*.

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.

Nasucha, chaizi, 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.





# LAMPIRAN

**PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA BINJAI**

**KUESIONER PENELITIAN**

**1. Identitas Responden**

Nama : .....(boleh tidak diisi / inisial)

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Usia : .....tahun

Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  Sarjana  Magister

Jenis Pekerjaan :  PNS  Pegawai Swasta  
 Wiraswasta  Lainnya

Lama Menjadi WP :  1-5 thn  6-10thn  >10 thn

**2. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Peneliti mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu /Saudara/i membayar pajak dengan memberi tanda ceklist (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

STS = Sangat Tidak Setuju      SS = Sangat Setuju  
TS = Tidak Setuju              KS = Kurang Setuju  
S = Setuju

### A. Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Menurut anda, petugas KPP telah membantu anda sesuai dengan prosedur.					
2.	Menurut anda, waktu pelayanan dan pemeriksaan sudah efisien dan efektif.					
3.	Menurut anda, prosedur pelayanan dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tidak berbelit-belit.					
4.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan melalui program komputerisasi, seperti pelaporan pajak ( <i>e-Filing, e-SPT online</i> ) telah dijalankan.					
5.	Menurut anda, formulir yang dibutuhkan mudah diperoleh.					
6.	Menurut anda, pelayanan dan pemeriksaan telah sesuai dengan permintaan publik.					
7.	Menurut anda, petugas pajak disiplin waktu dengan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.					
8.	Menurut anda, petugas pajak kompeten dalam tugasnya.					

### B. Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame dan media cetak lainnya.					
2.	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3.	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
4.	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana.					

5.	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					
----	---	--	--	--	--	--

### C. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP ataupun dari situs online yang disediakan DJP.					
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					
6.	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

Atas bantuan Bapak / Ibu / Saudara / i sekalian, saya ucapkan

**TERIMA KASIH**



## A. UJI VALIDITAS DATA DAN RELIABILITAS DATA

### 1). Uji Validitas

#### Validitas Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

		Correlations								Reformasi Administrasi Perpajakan
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	,091	-,056	,243	,104	,259	-,021	,231	,534**
	Sig. (2-tailed)		,532	,697	,090	,474	,069	,884	,106	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	,091	1	,131	-,059	-,027	,291*	,126	-,042	,426**
	Sig. (2-tailed)	,532		,366	,682	,850	,040	,383	,770	,002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	-,056	,131	1	-,130	,094	,061	,165	-,304*	,321*
	Sig. (2-tailed)	,697	,366		,369	,515	,672	,252	,032	,023
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	,243	-,059	-,130	1	-,277	,310*	,007	,092	,350*
	Sig. (2-tailed)	,090	,682	,369		,052	,029	,964	,524	,013
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	,104	-,027	,094	-,277	1	-,062	-,033	,235	,315*
	Sig. (2-tailed)	,474	,850	,515	,052		,671	,822	,100	,026
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Pertanyaan 6	Pearson Correlation	,259	,291*	,061	,310*	-,062	1	,075	,034	,592**
	Sig. (2-tailed)	,069	,040	,672	,029	,671		,604	,813	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 7	Pearson Correlation	-,021	,126	,165	,007	-,033	,075	1	,092	,424**
	Sig. (2-tailed)	,884	,383	,252	,964	,822	,604		,524	,002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 8	Pearson Correlation	,231	-,042	-,304*	,092	,235	,034	,092	1	,388**
	Sig. (2-tailed)	,106	,770	,032	,524	,100	,813	,524		,005
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Reformasi Adminitrasi Perpajakan	Pearson Correlation	,534**	,426**	,321*	,350*	,315*	,592**	,424**	,388**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,023	,013	,026	,000	,002	,005	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

		Correlations					Pengetahuan Perpajakan
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	-,280*	-,071	,187	-,169	,282*
	Sig. (2-tailed)		,049	,626	,193	,241	,047
	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	-,280*	1	,212	-,107	-,066	,316*
	Sig. (2-tailed)	,049		,139	,460	,648	,026
	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	-,071	,212	1	,035	-,104	,499**
	Sig. (2-tailed)	,626	,139		,807	,473	,000

	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	,187	-,107	,035	1	,238	,655**
	Sig. (2-tailed)	,193	,460	,807		,096	,000
	N	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 5	Pearson Correlation	-,169	-,066	-,104	,238	1	,424**
	Sig. (2-tailed)	,241	,648	,473	,096		,002
	N	50	50	50	50	50	50
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	,282*	,316*	,499**	,655**	,424**	1
	Sig. (2-tailed)	,047	,026	,000	,000	,002	
	N	50	50	50	50	50	50

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	,127	,028	-,137	,040	-,061	,281
	Sig. (2-tailed)		,418	,849	,343	,782	,673	,057
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	,117	1	,323*	,397**	,000	,007	,519**
	Sig. (2-tailed)	,418		,022	,004	1,000	,961	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	,028	,323*	1	,570**	,770**	,169	,822**
	Sig. (2-tailed)	,849	,022		,000	,000	,242	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	-,137	,397**	,570**	1	,418**	,296*	,750**
	Sig. (2-tailed)	,343	,004	,000		,003	,037	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50

Pertanyaan 5	Pearson Correlation	,040	,000	,770**	,418**	1	,124	,680**
	Sig. (2-tailed)	,782	1,000	,000	,003		,392	,000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Pertanyaan 6	Pearson Correlation	-,061	,007	,169	,296*	,124	1	,438**
	Sig. (2-tailed)	,673	,961	,242	,037	,392		,001
	N	50	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation	,271	,519**	,822**	,750**	,680**	,438**	1
	Sig. (2-tailed)	,057	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	50	50	50	50	50	50	50

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2). Uji Reliabilitas

### Reliabilitas Reformasi Administrasi Perpajakan (X1)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,320	,331	8

### Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,613	,606	6

## Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,808	,812	5

## B. Uji ASUMSI KLASIK

### 1). Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,23664176
Most Extreme Differences	Absolute	,100
	Positive	,100
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,704
Asymp. Sig. (2-tailed)		,705

a. Test distribution is Normal.

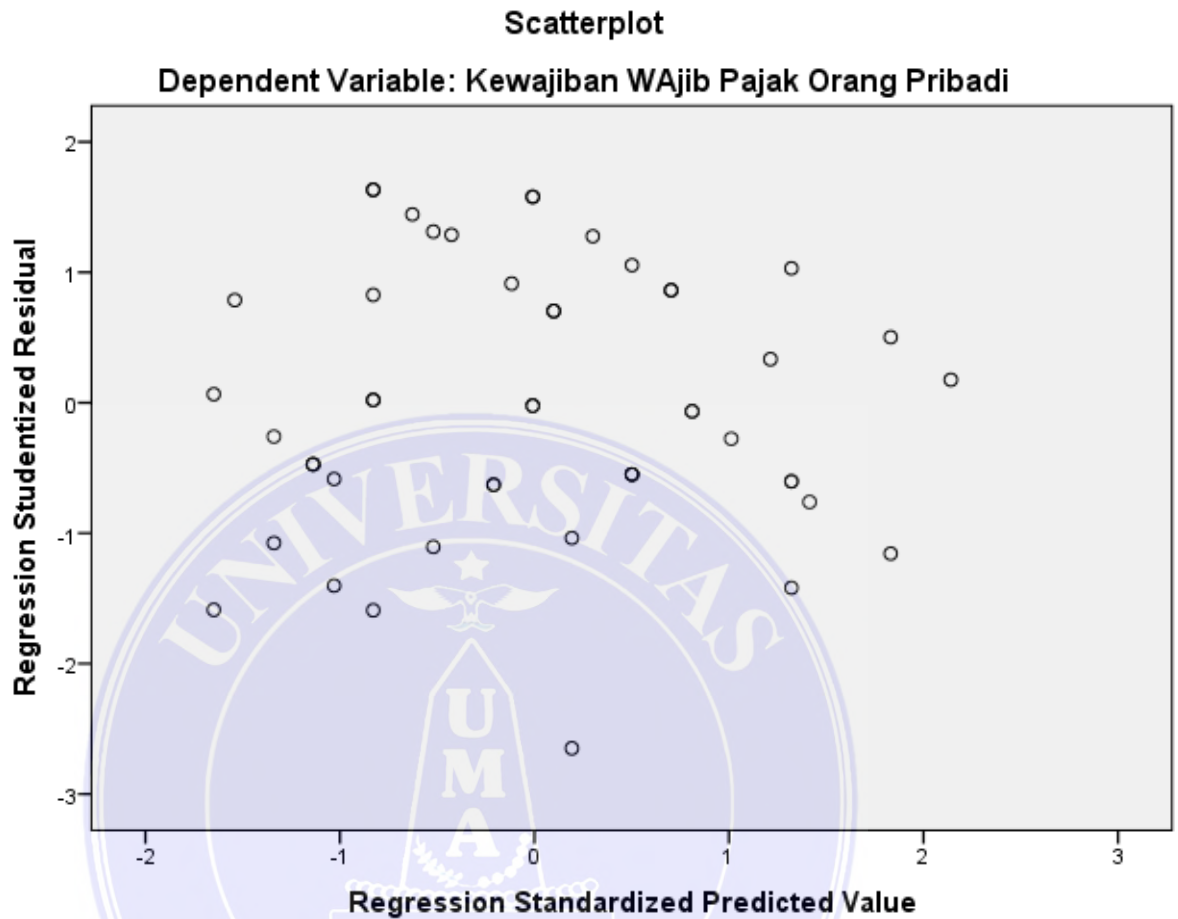
b. Calculated from data.

### 2). Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Reformasi Administrasi Perpajakan	,955	1,047
1 Pengetahuan Perpajakan	,955	1,047

### 3). Uji Heteroskedastisitas



## C. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

### 1). Uji Parsial (uji t)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,633	4,384		-,829	,411		
Reformasi Administrasi Perpajakan	,656	,111	,613	5,924	,000	,955	1,047
Pengetahuan Perpajakan	,397	,152	,271	2,620	,012	,955	1,047

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



## 2). Uji Simultan (uji F)

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	80,985	2	40,493	25,397	,000 <sup>b</sup>
Residual	74,935	47	1,594		
Total	155,920	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

## 3). Koefisien Determinasi (uji R Square)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,721 <sup>a</sup>	,519	,499	1,263	1,702

a. Predictors: (Constant), Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## DATA VARIABEL REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (X1)

RESPONDEN	(X1).1	(X1).2	(X1).3	(X1).4	(X1).5	(X1).6	(X1).7	(X1).8	TOTAL (X1)
1	4	4	5	5	4	5	4	4	35
2	4	5	5	4	4	5	5	4	36
3	4	4	4	5	4	3	4	5	33
4	5	4	4	5	4	5	5	5	37
5	5	4	4	5	5	4	4	5	36
6	3	5	4	5	3	4	4	4	32
7	5	4	4	4	5	4	3	4	33
8	4	5	5	5	4	4	5	4	36
9	5	4	4	5	4	5	4	5	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	3	4	5	4	32
12	4	4	5	4	5	5	5	5	37

13	4	5	5	4	4	5	4	4	35
14	4	5	5	4	4	5	4	4	35
15	5	5	4	3	4	4	4	4	33
16	5	4	4	5	4	4	4	5	35
17	3	4	4	4	4	4	4	4	31
18	5	5	5	5	4	5	4	4	37
19	5	4	4	5	3	5	4	5	35
20	4	4	5	5	4	5	4	4	35
21	4	5	4	4	4	4	4	5	34
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	5	33
24	4	4	5	4	5	4	4	5	35
25	4	4	5	4	4	4	4	4	33
26	4	4	5	4	4	4	4	4	33
27	4	4	3	5	4	5	4	4	33
28	4	4	4	4	4	4	4	5	33
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	5	4	4	4	4	4	33
31	4	4	4	4	5	5	4	5	35
32	4	5	4	4	5	5	4	5	36
33	5	5	4	5	4	5	5	5	38
34	5	5	5	4	4	5	5	4	37
35	4	4	5	4	4	4	5	4	34
36	4	4	5	5	4	5	5	4	36
37	4	5	4	4	5	4	5	5	36
38	4	4	4	4	4	4	5	5	34
39	4	4	4	4	4	4	5	5	34
40	4	4	5	4	4	4	5	5	35
41	4	4	5	4	4	4	4	4	33
42	4	4	5	4	4	4	4	4	33
43	4	4	3	5	3	5	4	4	32
44	4	4	4	4	5	4	5	4	34
45	4	4	4	4	4	4	5	4	33
46	4	4	5	4	4	4	4	4	33
47	4	4	4	4	4	5	4	5	34
48	4	5	4	4	4	5	4	5	35
49	4	4	4	4	5	4	4	4	33
50	4	4	4	4	4	4	4	5	33

## DATA VARIABEL PENGETAHUAN PERPAJAKAN (X2)

RESPONDEN	(X2).1	(X2).2	(X2).3	(X2).4	(X2).5	TOTAL (X2)
1	4	4	4	4	4	20
2	4	5	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	4	22
5	5	4	4	4	4	21
6	3	5	4	4	5	21
7	5	4	4	4	5	22
8	4	5	5	4	4	22
9	4	5	4	4	5	22
10	4	5	4	4	4	21
11	3	4	4	4	4	19
12	5	5	5	4	4	23
13	4	4	5	4	4	21
14	4	3	3	4	4	18
15	4	4	5	5	5	23
16	4	4	4	5	4	21
17	4	5	5	3	4	21
18	4	5	3	4	4	20
19	3	5	5	3	3	19
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	5	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	5	5	5	4	23
24	5	4	4	5	4	22
25	4	4	3	3	5	19
26	4	5	5	4	4	22
27	4	4	5	4	4	21
28	4	4	4	5	4	21
29	4	5	4	4	3	20
30	4	4	4	4	3	19
31	5	4	4	4	4	21
32	5	4	4	4	3	20
33	4	4	4	3	4	19
34	4	4	4	5	5	22
35	4	5	4	4	4	21
36	4	5	4	5	4	22
37	5	4	4	4	3	20
38	4	4	4	3	4	19
39	4	4	4	5	5	22

40	4	4	4	5	5	22
41	4	4	5	3	4	20
42	4	5	3	4	4	20
43	3	5	4	3	4	19
44	5	4	4	4	4	21
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	5	4	4	21
48	4	4	5	4	4	21
49	5	4	4	4	3	20
50	4	4	4	3	4	19

### DATA VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

RESPONDEN	(Y).1	(Y).2	(Y).3	(Y).4	(Y).5	(Y).6	TOTAL (Y)
1	4	4	4	4	4	4	24
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	5	4	5	4	27
4	5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	5	5	28
6	4	4	4	4	4	5	25
7	5	4	4	4	4	5	26
8	4	5	5	4	5	4	27
9	4	4	5	5	5	5	28
10	5	4	4	3	4	4	24
11	4	4	4	3	4	4	23
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	4	4	4	5	27
14	4	4	5	5	5	5	28
15	4	4	5	5	5	5	28
16	5	4	5	4	5	4	27
17	5	4	4	4	4	5	26
18	5	4	5	5	5	5	29
19	5	4	5	5	5	4	28
20	4	4	4	5	4	5	26
21	4	4	5	4	5	5	27
22	5	4	4	4	4	4	25
23	5	4	5	4	5	5	28
24	4	4	5	5	5	5	28
25	4	4	4	4	4	5	25

26	5	4	4	4	4	5	26
27	4	4	4	4	4	5	25
28	5	4	5	4	5	5	28
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	4	4	4	4	4	25
31	4	4	5	5	5	4	27
32	5	4	5	5	5	5	29
33	5	4	5	4	5	5	28
34	4	5	5	5	4	5	28
35	5	5	5	5	4	5	29
36	4	5	5	5	4	5	28
37	5	5	5	5	5	4	29
38	5	5	5	5	4	4	28
39	4	5	5	5	5	5	29
40	4	5	5	5	5	4	28
41	4	5	5	5	4	5	28
42	5	4	4	4	4	5	26
43	4	4	4	5	4	4	25
44	4	4	4	5	5	5	27
45	5	5	4	4	4	4	26
46	5	5	4	5	4	5	28
47	5	4	5	5	5	5	29
48	5	5	5	5	5	4	29
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	4	4	4	4	4	25